

**KEBERADAAN LEMBAGA ADAT DALAM KONSEP OTONOMI DESA
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

(Studi tentang Lembaga Adat “Perdikan” di Desa Wonobodro Kecamatan
Blado Kabupaten Batang)

TESIS

Diajukan Kepada
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Magister dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**AGUS JELANI MURSIDI
NIM. R.100030011**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2005**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri sendiri.

(AR RA'D ayat 11)

Winners : "I can"

Losers : "I can't"

Orang-orang yang sukses berkata : "Saya bisa" ; orang – orang

Yang gagal berkata : "Saya tidak bisa"

Winners think and act;

Losers act and think

Orang-orang yang sukses berpikir dulu; orang – orang

yang gagal bertindak dulu baru berpikir

Winners are achievers;

Losers are sustainers

Orang-orang yang sukses selalu berprestasi; orang – orang

yang gagal bertopang dagu

Winners are problem as a challenge;

Losers as a burden.

Orang-orang yang sukses menghadapi masalah sebagai tantangan; orang-orang

yang gagal menghadapi masalah sebagai beban.

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

Ytc. Istriku : Nok Mustofiyah, SH

Yts. Anakku : Devi Adhadila Cahyaning

ABSTRAK

Lembaga adat “Perdikan” di Desa Wonobodro dalam konsep otonomi desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan salah satu fenomena kelembagaan adat yang ada di Kabupaten Batang. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, sesuai dengan kondisinya belum sepenuhnya terjadi hubungan interaksi baik dari sisi hubungan lembaga adat dengan lembaga pemerintahan maupun budaya hukum masyarakatnya.

Untuk mempertahankan eksistensi lembaga adat dan budaya hukumnya dalam konsep otonomi desa sesuai dengan otonomi daerah diupayakan adanya konsistensi semangat pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan serta pembinaan, artinya masyarakat adat dan non adat diberikan keberdayaan dalam melaksanakan aktivitas adat budayanya untuk mendukung konsep otonomi.

Berdasarkan hasil penelitian. Lembaga adat “Perdikan” selain melaksanakan aktivitas kekuasaan atas tanah adat yang menurut arti gramatikalnya adalah seseorang yang dibebaskan dari pembayaran pajak, pada kenyataannya sekarang justru telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, juga melaksanakan adat kebiasaan yang bersifat kegiatan ritual keagamaan “Khol”. Untuk dapat memperkuat eksistensi lembaga adat “Perdikan” perlu upaya komitmen bersama mengkonstruksi budaya hukum dalam rangka mewujudkan pelaksanaan konsep otonomi dan memberikan pelayanan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan lembaga adat.

Kata Kunci : Otonomi desa, Pemberdayaan masyarakat dan Budaya hukum.

ABSTRACT

The cultural institution “Perdikan” in Wonobodro Village in the term of rural autonomy based on the Rule of Law Number 32, 2004, on Regional Autonomy is one of cultural institutional phenomenon existing in Batang Residence. Although there is the Batang Regional Rule Number 15, 2000, on Empowerment, Preservation and Development of the Customs and Its Institution, the interaction among the cultural institution, government institution and society legal culture are not done well yet.

To maintain the existence of the cultural institutions and its legal culture in the term of rural autonomy based on regional autonomy, it is necessary to build the consistence of empowerment, preservation, development and establishment spirit. It means that cultural and non-cultural communities are empowered to do their cultural activities in order to succeed the concept of autonomy.

Based on the result of the study. The cultural institution “Perdikan” has conducted a religious ceremony called “Khol”, despite the activity of authorizing of their cultural land. “Perdikan” means grammatically somebody who is free of tax, but in the present life they has obeyed their obligation to pay their tax. To strengthen the existence of the cultural institution “Perdikan”, it is necessary to make a commitment of all to construct legal culture in order to bring about autonomy concept and give service, empowerment, preservation and development of cultural institution.

Key term : Rural Autonomy, The empowerment of society and Legal culture.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat, karunia, taufik dan hidayahNya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.Hum) pada Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS) di Surakarta yang bekerjasama dengan Universitas Pekalongan (UNIKAL).

Yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah Keberadaan Lembaga Adat Dalam Konsep Otonomi Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi tentang Lembaga Adat “Perdikan” di Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang).

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, baik dari segi isi maupun teknis penyajiannya. Oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima setiap saran dan kritik yang bersifat membangun dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bidang pekerjaan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji MS, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk dapat mengikuti program sampai dengan penyusunan tesis ini hingga selesai.

2. Yth. Bapak Dr. HM. Wahyuddin, MS, Direktur Program Magister Ilmu Hukum (M.Hum) yang telah memberikan kesempatan dalam proses penyelesaian program sampai dengan penyusunan tesis ini hingga selesai.
3. Yth. Ibu Prof. Dr. Esmi Warassih, SH. MS, sebagai Rektor Universitas Pekalongan dan juga sebagai Pembimbing yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan program serta penyusunan tesis hingga selesai.
4. Yth. Bapak Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., MHum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi kesempatan untuk dapat mengikuti program Magister Ilmu Hukum.
5. Yth. Bapak Natangsa Surbakti, SH. MHum., sebagai Pembimbing yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan program serta penyusunan tesis hingga selesai.
6. Yth. Bapak-bapak Dosen yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian program.
7. Yth. Bapak Bambang Bintoro, SE., sebagai Bupati Batang yang telah memberi kesempatan untuk dapat mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Pekalongan yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8. Yth. Bapak Soetadi, SH. MM., sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Batang yang telah memberi kesempatan untuk dapat mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Pekalongan yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

9. Yth. Bapak Drajat Himawan SSos., sebagai Asisten III Sekda yang telah memberi kesempatan untuk dapat mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Pekalongan yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
10. Yth. Bapak Alimudin, SH., Sebagai kepala Bagian Setda Kab. Batang yang telah memberi kesempatan untuk dapat mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Pekalongan yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
11. Yth. Ibu Sri Hayuisti, SH. SpNot., sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Batang yang telah memberi kesempatan untuk dapat mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Pekalongan yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
12. Yth. Rekan-rekan Mahasiswa dan semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan/ bantuan baik moril maupun material dalam penyusunan tesis ini.
13. Yth. Kepada seluruh staf Bagian Hukum Setda Kab. Batang yang telah ikut memberikan dorongan / bantuan baik moril maupun material dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Surakarta, 17 Juni 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Kerangka Teoretis.....	9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan.....	19
 BAB II. LEMBAGA ADAT, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DAN OTONOMI DESA.....	 23
A. Hukum Adat dan Lembaga Adat.....	23
B. Masyarakat Hukum Adat.....	41
C. Keterkaitan Budaya Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional.....	47
D. Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Otonomi Desa.....	51
 BAB III. MASYARAKAT ADAT “PERDIKAN” WONOBODRO DALAM PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT.....	 72
A. Masyarakat Desa Wonobodro.....	72
B. Masyarakat Adat “Perdikan” Wonobodro.....	77
C. Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat “Perdikan” Wonobodro.....	81
D. Budaya Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat “Perdikan” onobodro	88

BAB IV.	ANALISIS TEORITIK TENTANG LEMBAGA ADAT SESUAI KONSEP OTONOMI DESA	94
A.	Implementasi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat	94
B.	Budaya Hukum dalam Lembaga Adat “Perdikan” Wonobodro	102
C.	Penguatan Eksistensi Lembaga Adat “Perdikan” Wonobodro	109
BAB V.	SIMPULAN DAN REKOMENDASI	117
A.	Simpulan	117
B.	Rekomendasi	119
DAFTAR PUSTAKA.....		121
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....		127

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat.
2. Lampiran 2 : Susunan Keanggotaan Panitia Khol Auliya' Wonobodro Khususon Waliyullah Syekh Maulana Maghribi Dan Sunan Kudus Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun 2005 M / 1426 H.
3. Lampiran 3 : Surat Keputusan Panitia Khol Tentang pelaksanaan Khol Auliya' Wonobodro khususon Waliyullah Syekh Maulana Maghribi dan Sunan Kudus Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang tahun 2005 M / 1426 H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebhinekaan masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA) sudah ada sejak zaman leluhur, sejak zaman Melayu Polinesia, sebagai akibat berbeda-bedanya asal usul keturunan, tempat kediaman dan alam lingkungan, dan masuknya pengaruh agama Hindu-Budha, Islam dan Kristen / Katolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara.¹

Di dalam masyarakat dikenal kata “adat”. Istilah ini berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini dapat dikatakan telah diserapi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua bahasa daerah di Indonesia. Adat, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti *kebiasaan*.²

Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Dengan demikian hampir semua tindakan manusia adalah, kebudayaan, karena jumlah tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dibiasakannya dengan belajar (yaitu tindakan naluri, refleksi, atau tindakan-tindakan yang dilakukan akibat

¹ Hilman Hadikusumo, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, hal 4.

² Soleman. B. Taneko, 1987, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, Cetakan I, hal 3.

suatu proses fisiologi, maupun berbagai tindakan membabibuta), sangat terbatas.

Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu mata uang dengan dua sisi. Ia dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Di mana ada masyarakat, di sana juga ada kebudayaan karena kebudayaan itu merupakan hasil masyarakat, yaitu manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama.³

Dalam pengertian kebudayaan ini adalah termasuk tradisi, dan “tradisi” dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi itu justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia yang diangkat dalam keseluruhannya. Manusialah yang membuat sesuatu dengan tradisi itu, ia menerimanya, menolaknya, atau mengubahnya.

Secara singkat, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan paling sedikit mempunyai tiga wujud, yaitu⁴ :

- a. sebagai kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dsb
- b. sebagai kompleks dari aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat
- c. sebagai benda-benda hasil karya.

³ Ibid, hal 80.

⁴ Ibid, hal 81.

Kebudayaan menurut Selo Sumardjan adalah hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang hidup bersama. Karya menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan, yang diperlukan dan dipergunakan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir manusia yang antara lain menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah dan nilai kemasyarakatan yang diperlukan untuk mengatur masyarakat.

Dengan demikian, kebudayaan pada hakikatnya, unsur rasa pada khususnya, merupakan struktur normatif atau yang disebut **Ralph Linton** sebagai *design for living*. Artinya bahwa kebudayaan merupakan suatu *blueprint of behavior* yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan.⁵

Dari keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum merupakan hukum adat, maka adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat itu berada dalam lingkup wilayah yang homogen seperti desa yang dalam kerangka hukum di Indonesia, desa adalah sebuah daerah hukum yang paling bawah yang mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus itu adalah nilai-nilai kerukunan, kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah mufakat.

⁵ Ibid, hal 82.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Daerah berkewajiban untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat, melalui peraturan perundang-undangan di daerah.

Pada tingkat pemerintahan di daerah seperti di Kabupaten Batang pengaturan berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan daerah telah diakomodasikan dalam produk hukum Peraturan Daerah sebagai alat / sarana dan prasarana untuk mengatur dan mengurus kepentingannya termasuk di antaranya pengaturan mengenai desa dalam wilayah Kabupaten Batang yang terdiri dari tiga belas Peraturan Daerah. Di antara ketiga belas Peraturan Daerah di Kabupaten Batang tersebut, salah satu di antaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat. Peraturan Daerah ini mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat lebih memperhatikan dan mengutamakan pemberdayaan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam wilayahnya.

Di Kabupaten Batang khususnya di Desa Wonobodro dan juga desa-desa sekitarnya dalam wilayah Kabupaten Batang terdapat adat istiadat

kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak mengesampingkan atau meninggalkan konsep pemerintahan di tingkat desa dengan otonominya. Sebagai contoh di Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang berkembang suatu adat kebiasaan yang berupa kegiatan peringatan “Khol” leluhur tokoh agama “kyai” yang bernuansa Islam. Adat kebiasaan ini telah dilaksanakan bertahun-tahun, diakui dan dihormati sebagai suatu kegiatan adat yang bersifat keagamaan yang berlangsung terus menerus dan dilaksanakan oleh kelembagaan yang telah terbentuk lama dan turun-temurun pula, yaitu lembaga “Perdikan”.

Memperhatikan adat kebiasaan yang berkembang di desa Wonobodro tersebut, maka dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pula adanya konsep otonomi desa dalam kerangka otonomi daerah perlu kiranya Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan peran sertanya dalam memberdayakan dan melestarikan serta mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat “perdikan” di desa Wonobodro, sehingga prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip seluas-luasnya dapat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusannya termasuk kebijakan-kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis menyusun hasil penelitian ini secara sistematis dalam bentuk tesis sebagai tugas akhir dan persyaratan dalam menempuh program Magister Ilmu Hukum dengan judul “**KEBERADAAN LEMBAGA ADAT DALAM KONSEP OTONOMI DESA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**”.

B. Permasalahan

Keberadaan lembaga adat “Perdikan” di desa Wonobodro merupakan salah satu kekayaan adat yang dimiliki di Kabupaten Batang. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan adanya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada kenyataannya belum ada konkretisasi pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut terhadap keberadaan lembaga adat. Dengan demikian Peraturan Daerah tersebut belum dapat dilaksanakan sebagai salah satu sarana untuk pemberdayaan masyarakat dan di sisi lain fungsi hukum sebagai bahan pemberdayaan tampaknya belum dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang menjadi fokus perhatian dalam studi ini adalah tentang Lembaga Adat “Perdikan” Wonobodro di Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang khususnya keberadaan lembaga adat tersebut menurut konsep otonomi desa

dalam rangka pelaksanaan pengaturan mengenai desa dengan berbagai permasalahannya.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, yang dilengkapi dengan hasil observasi awal yang telah dilaksanakan, maka peneliti tertarik mengungkap masalah yaitu :

- a. Bagaimana latar belakang lembaga adat “Perdikan” di Desa Wonobodro dan budaya hukum masyarakatnya ?
- b. Bagaimanakah Relevansi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dengan lembaga adat “Perdikan di Desa Wonobodro ?
- c. Bagaimana eksistensi lembaga adat berkaitan dengan konsep otonomi desa dalam praktek ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang adanya lembaga adat “Perdikan” di Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang dan budaya hukum dari masyarakatnya
- b. Untuk mengetahui relevansi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan

Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dengan lembaga adat “Perdikan” di Desa Wonobodro

- c. Untuk mengetahui dan mendalami eksistensi lembaga adat dengan penerapan konsep otonomi desa sebagai otonomi desa di Kabupaten Batang sebagai langkah pelaksanaan konsep otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. **Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan kritik dan saran serta manfaat (kegunaan) sebagai berikut :

- a. Terhadap aspek ilmu pengetahuan hasil penelitian ini dapat menjadi khasanah/wacana baru dalam keberadaan lembaga adat khususnya membahas mengenai keberadaan lembaga “Perdikan” Desa Wonobodro
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat antara lain :
 - 1) Sebagai upaya pemahaman yang mendalam dan mengetahui perubahan fungsi dan peranan Otonomi Desa sebagai akibat perubahan Undang-undang tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- 2) Sebagai pedoman untuk penyempurnaan atas pelaksanaan produk hukum Peraturan Daerah yang mengatur mengenai desa di Kabupaten Batang khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat
- 3) Bagi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa serta Masyarakat Desa bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan atas perubahan nama, fungsi kelembagaan desa, hubungan vertikal dan horisontal serta untuk mengetahui konsep transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah desa dan lembaga adat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

D. Kerangka Teoretis

Mempelajari hukum dapat dilakukan melalui pengkajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan segala seluk beluk mengenai hukum itu sendiri, baik asas-asas hukum yang pokok, sistem formal hukum, konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat, kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum dan lain-lain. Oleh karena itu perlu adanya pilihan metode hukum yang akan dipilih yang meliputi 3 (tiga) pilihan metode hukum sebagai berikut⁶ :

1. Hukum yang dilihat sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat *idealis*.

⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 5 - 6.

Metode ini akan senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu.

2. Hukum yang dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subjek tersendiri, terlepas dari kaitan-kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut. Pemusatan perhatian yang demikian ini akan membawa seseorang kepada penggunaan metode yang *normatif analitis*.
3. Hukum yang dipahami sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode *sosiologis*. Metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas dari hukum.

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa cara pandang mengenai hukum itu berimplikasi pada metode yang akan dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum. Untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai hukum, maka harus dilihat dari dua sisi yaitu secara normatif (*law in books*) dan sosiologis (*law in actions*).

Berkaitan dengan pemecahan masalah dalam penelitian ini, diperlukan bantuan paradigma penelitian yaitu suatu paradigma sosial. Mengenai paradigma ini, **George Ritzer**⁷, dengan mensintesis pengertian paradigma yang dikemukakan oleh Kuhn, Masterman dan Friedrichs, merumuskan

⁷ George Ritzer, 2003, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (terjemahan) Alimandan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 6-7.

pengertian paradigma itu secara lebih jelas dan terperinci. Menurut paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (*dicipline*). Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti di jawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Paradigma adalah kesatuan konsensus yang terluas dalam suatu cabang ilmu pengetahuan dan yang membantu membedakan antara satu komunitas ilmuwan (atau sub komunitas) dari komunitas ilmuwan lainnya. Paradigma menggolong-golongkan, merumuskan dan menghubungkan : eksemplar, teori-teori dan metode-metode serta seluruh pengamat yang terdapat dalam metode itu.

Adapun paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah paradigma definisi sosial, yang menganalisa tentang tindakan sosial (sosial action). Konsep Weber ini tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Struktur sosial dan pranata sosial keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna.⁸

⁸ Ibid, hal 37.

Sementara itu teori yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu teori interaksionisme simbolik yang mempunyai pandangan bahwa manusia merupakan aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Tokoh teori enteraksionisme simbolik ini adalah **Herbert Blumer**.

Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik ini menunjukkan kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antar individu, *diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi* atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi dalam proses interaksi manusia itu bukan suatu proses di mana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respon. Tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, diantarai oleh proses interpretasi oleh si aktor. Jelas proses interpretasi ini adalah proses berpikir yang merupakan kemampuan yang khas yang dimiliki manusia.⁹

Menurut teori interaksionisme simbolik ini fakta sosial bukanlah merupakan barang sesuatu yang mengendalikan dan memaksakan tindakan manusia. Fakta sosial sebagai aspek yang memang penting dalam kehidupan

⁹ Ibid, hal 52.

masyarakat, ditempatkan di dalam kerangka simbol-simbol interaksi manusia. Dalam hal ini bahwa organisasi masyarakat merupakan kerangka di dalam mana tindakan-tindakan sosial mengambil tempat, bukan merupakan faktor penentu dari tindakan sosial. Pengorganisasian dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu adalah hasil dari kegiatan unit-unit tindakan dan bukan karena kekuatan-kekuatan yang terletak di luar perhitungan unit-unit tindakan itu. Kumpulan orang-orang yang merupakan unit-unit tindakan, tidak bertindak menurut kultur, struktur sosial atau kesukaannya saja, melainkan bertindak menurut situasi tertentu.¹⁰

Keberadaan Lembaga adat di desa Wonobodro telah ada sejak jaman kerajaan Mataran yang dipimpin oleh Raja Sultan Agung dan khususnya di Kabupaten Batang dibawah kepemimpinan Tumenggung Bahurekso. Pada Waktu itu karena jasa tokoh agama di desa Wonobodro yaitu Ki Ageng Wonobodro, maka oleh Tumenggung Bahurekso atas perintah Raja Mataram memberikan hadiah berupa aset tanah untuk dipergunakan sebagai persediaan makanan bagi pejuang Mataram dalam penyerangan ke Batavia melawan Penjajah Belanda. Dan kepada mereka juga diberikan kebebasan terhadap kewajiban pembayaran upeti kepada kerajaan.

Pada perkembangannya kelembagaan adat itu masih tetap ada di desa Wonobodro, akan tetapi dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

¹⁰ Ibid, hal 53.

Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka kepastian hukum terhadap hak atas tanah berdasarkan hukum adat diberlakukan menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia baik kepemilikan maupun kewajiban pembayaran pajaknya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam rangka penulisan tesis ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian *sosio – legal*. Menurut Sunaryati Hartono, metode *sosio-legal research* memberikan bobot lebih pada sebuah penelitian karena pembahasan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, namun lebih melihat pada aspek bekerjanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Penelitian di bidang hukum, dibedakan dalam dua cabang studi yaitu studi mengenai *law in books* dan studi mengenai *law in actions*. Studi terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris. Dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonomi) tetapi

¹¹ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni Bandung, hal 142.

sebagai suatu institusi sosial yang dihasilkan secara riil dari variabel-variabel sosial yang lain.

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan metode pendekatan sosiologis, pertimbangan pilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam studi lembaga adat ini di samping dipelajari peraturan-peraturan perundangan secara normatif juga diteliti bagaimana fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan adat istiadat khususnya keberadaan lembaga adat di Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Oleh karena itu pendekatan normatif digunakan dalam studi dari aspek peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari sisi pemberdayaan maupun aspek yuridis lainnya, sementara itu pendekatan sosiologis yang secara lebih spesifik menggunakan pendekatan interaksional / mikro ini digunakan berkaitan dengan keberadaan lembaga adat yang berlaku yang ada kaitannya antara individu dengan produk peraturan sebagai fenomena, yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan falsafah dan asas dalam proses penyusunan produk hukum daerah yang salah satunya adalah aspek pemberdayaan masyarakat.

2. Instrumen Penelitian

Sebagai instrumen utama penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti adalah merupakan instrumen kunci (*key instrument* / alat

penelitian utama). Peneliti yang mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara tak berstruktur, sering hanya menggunakan buku. Hanya manusia sebagai instrumen dapat memahami makna interaksi antar manusia, mengalami perasaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan responden.¹²

Sementara itu dalam penelitian ini, selain instrumen yang digunakan adalah peneliti itu sendiri, juga beberapa responden serta didukung dengan instrumen lain yakni buku-buku catatan, questioner yang hanya dipakai sebagai pedoman dalam wawancara.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Wonobodro Kecamatan Blado sebagai objek lokasi penelitian utama dengan objek lembaga adat “Perdikan”, dan Desa Ujung negoro Kecamatan Tulis sebagai objek lokasi penelitian pendamping, keduanya berada di wilayah Kabupaten Batang. Pemilihan objek lembaga adat “Perdikan” tersebut di dasarkan atas pertimbangan : *Pertama*, Desa Wonobodro merupakan salah satu desa yang telah mengadakan dan membudayakan kegiatan yang bersifat keagamaan berupa pelaksanaan “Khol” di Makam Syekh Maulana Maghribi, *Kedua*, dalam pelaksanaan kegiatan ritual “Khol” di Desa Wonobodro telah ada lembaga adat yang dinamakan “Perdikan”, *Ketiga*, Kegiatan yang bersifat keagamaan yang sejenis di wilayah Kabupaten Batang berada di Desa Ujung Negoro Kecamatan Tulis, *Keempat*, dalam

¹² Nasution, S. 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Transito, Bandung, hal. 9.

rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sudah dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dan di Kabupaten Batang telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan secara akurat, sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa instrumen kunci yang utama adalah peneliti itu sendiri. Akan tetapi dari pengamatan ataupun wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti terkadang belum cukup. Oleh karena itu dipergunakan teknik sampling yang disebut *snow ball* sampling artinya memaparkan kepada beberapa anggota responden. Demikian seterusnya sehingga akan diperoleh informasi dari sejumlah sampel yang relatif besar.¹³

Dalam studi keberadaan lembaga adat ini informan kunci selain dari peneliti adalah responden yang berhubungan dengan keberadaan Lembaga Adat “Perdikan” di Desa Wonobodro, antara lain, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aparat Pemerintah Daerah, dan Kecamatan.

¹³ George Ritzer, Op.cit, hal. 31

4. Analisis Data

Analisis adalah proses penyusunan data-data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema atau kategori.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis. Untuk analisis kualitatif ini ada bermacam-macam cara yang dapat diikuti. Tidak ada salah satu tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi semua penelitian. Salah satu cara yang dianjurkan ialah mengikuti langkah-langkah berikut yang masih sangat bersifat umum yakni induksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.¹⁵

5. Validasi Data

Agar data atau informasi yang diperoleh dapat menjadi valid, maka data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dan dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat

¹⁴ Nasution, S., op.cit, hal 126

¹⁵ Ibid, hal. 129

kepercayaan data. Cara ini mencegah bahaya subjektifitas.¹⁶ Metode ini sering disebut triangulasi.

Data untuk mendukung penelitian ini selain hasil penelitian terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer untuk mengetahui keberadaan lembaga adat dalam konsep otonomi di Kabupaten Batang secara normatif yang antara lain :

- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pem, mberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat

F. Sistematika dan PeratanggungJawaban Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, yang tersusun secara berurutan dari bab pertama sampai bab terakhir, yang satu sama lain terdapat keterkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Substansi tesis ini diawali dengan memaparkan latar belakang permasalahan yang mengungkapkan adanya keberadaan lembaga adat

¹⁶ Ibid, hal. 11

“perdikan” dalam kancan modernisasi kebudayaan, adat istiadat dan pemerintahan serta konsep pemberdayaan dalam rangka melaksanakan kegiatannya di era otonomi desa. Oleh karena itu tidak mungkin membahas seluruh persoalan dalam satu tulisan yang relatif singkat, maka permasalahan studi ini difokuskan dalam tiga permasalahan utama sebagaimana diuraikan pada fokus permasalahan sebagai pertanyaan penelitian yaitu *pertama*, bagaimana latar belakang lembaga adat “Perdikan” di Desa Wonobodro dan budaya hukum masyarakatnya, *kedua*, bagaimanakah Relevansi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dengan lembaga adat “Perdikan di Desa Wonobodro dan *ketiga*, bagaimana eksistensi lembaga adat berkaitan dengan konsep otonomi desa dalam praktek yang dituangkan dalam bab I. Selanjutnya uraiannya akan diperjelas dalam kerangka teoritik yang digunakan sebagai landasan teori. Uraian bab pendahuluan ini, masih bersifat sebagai pengantar dalam merumuskan tujuan, kontribusi serta metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian.

Bab II berisi landasan teori berkaitan dengan hukum adat, lembaga adat, pemberdayaan adat dan lembaga adat. Dalam bab ini diuraikan tentang konsepsi hukum adat yang menjelaskan bagaimana hukum adat itu timbul dan diberlakukan di masyarakatnya. Selain hukum adat itu berlaku juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dan yang berlaku dalam masyarakat yang dilembagakan dalam suatu lembaga adat yang juga diakui keberadaannya. Melembaga di sini berarti diketahui, dipahami, dihayati, dan diterapkan

(diaplikasikan) ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari melembaganya sebuah kebiasaan menjadikan adat itu menjadi suatu budaya hukum. Akhirnya pada uraian ini dijelaskan bagaimana peran dan aktivitas masyarakat adat secara teoritis dengan kondisi yang ada di lapangan, berkaitan dengan konsep otonomi desa.

Bab III diuraikan diskripsi dan kondisi di lapangan sebagaimana yang terjadi dengan segala aspek latar belakang dan uraiannya, sementara itu bab IV menguraikan hubungan antara kondisi di lapangan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian di Desa Wonobodro serta korelasi dan langkah langkah dari pemerintah daerah atau desa dalam mengakomodasi kegiatan aktivitas kebiasaan atau adat istiadat sebagai upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat. Keberadaan, hubungan kemasyarakatan, kekerabatan dan pemerintahan dalam konsep otonomi desa adalah untuk mengantisipasi atau memberikan solusi keberadaan lembaga adat “perdikan” dalam era modernisasi ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir dan menampung keberadaan lembaga adat tersebut berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2000 tentang pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

Oleh karena itu, beberapa rekomendasi mengenai hasil penelitian ini, ditutup oleh bab V yang berupa simpulan dari segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab terakhir ini juga diberikan beberapa saran, baik kepada lembaga adat “perdikan”, pemerintah desa, dan

pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat di wilayah Kabupaten Batang.